



WALI KOTA TERNATE  
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALI KOTA TERNATE  
NOMOR 41 TAHUN 2024

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TERNATE,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);  
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

SKPD	BAG. HUKUM
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6057);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

SKPD	BAG. HUKUM
<i>p</i>	<i>h</i>

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
17. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2024 Nomor 234);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.



Pasal 1

Dalam Peraturan Wali kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Ternate.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Ternate.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ternate.

SKPD	BAG. HUKUM
1	1

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ternate.
6. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
7. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wlayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah.
8. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
9. Pembiayaan daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
10. Pendapatan Transfer adalah pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain.
11. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah adalah seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
13. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
14. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah.
15. Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
16. Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.
17. Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
18. Belanja Transfer adalah pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.
19. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.

SKPD	BAG. HUKUM
	

## Pasal 2

APBD Kota Ternate Tahun Anggaran 2025 terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

## Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp. 1.104.982.939.130,00,- (Satu Triliun Seratus Empat Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Seratus Tiga Puluh Rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer;
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

## Pasal 4

- (1) Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, direncanakan sebesar Rp. 141.318.000.000,00,- (Seratus Empat Puluh Satu Milyar Tiga Ratus Delapan Belas Juta Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pajak Daerah;
  - b. Retribusi Daerah;
  - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; dan
  - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 86.650.000.000,- (Delapan Puluh Enam Milyar Enam Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 37.718.000.000,- (Tiga Puluh Tujuh Milyar Tujuh Ratus Delapan Belas Juta Rupiah).
- (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.3.500.000.000,- (Tiga Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).
- (5) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 13.450.000.000,- (Tiga Belas Milyar Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

## Pasal 5

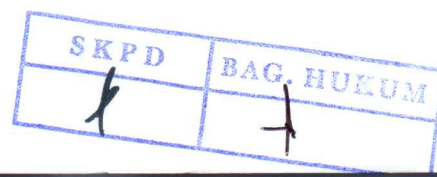
- (1) Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp. 86.650.000.000,00,- (Delapan Puluh Enam Milyar Enam Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pajak Hotel direncanakan sebesar Rp. 6.250.000.000,- (Enam Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);

SKPD	BAG. HUKU
	

- b. Pajak Restoran direncanakan sebesar Rp. 16.750.000.000, (Enam Belas Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);
- c. Pajak Hiburan direncanakan sebesar Rp. 3.000.000.000, (Tiga Milyar Rupiah);
- d. Pajak Reklame direncanakan sebesar Rp. 2.900.000.000, (Dua Milyar Sembilan Ratus Juta Rupiah);
- e. Pajak Penerangan Jalan direncanakan sebesar Rp. 28.000.000.000, (Dua Puluh Delapan Milyar Rupiah);
- f. Pajak Parkir direncanakan sebesar Rp. 500.000.000, (Lima Ratus Juta Rupiah);
- g. Pajak Air Tanah direncanakan sebesar Rp. 750.000.000, (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);
- h. Pajak Sarang Burung Walet direncanakan sebesar Rp. 0, (Nol Rupiah)
- i. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan direncanakan sebesar Rp. 1.500.000.000, (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah);
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan direncanakan sebesar Rp. 8.000.000.000,- (Delapan Milyar Rupiah); dan
- k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan direncanakan sebesar Rp.6.000.000.000 (Enam Milyar Rupiah).

#### Pasal 6

- (1) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 37.718.000.000,- (Tiga Puluh Tujuh Milyar Tujuh Ratus Delapan Belas Juta Rupiah) yang terdiri atas:
  - a. Retribusi Jasa Umum;
  - b. Retribusi Jasa Usaha;
  - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Anggaran Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 12.500.000.000,- (Dua Belas Milyar Lima Ratus Juta Rupiah), terdiri atas:
  - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan, yang direncanakan sebesar Rp.300.000.000,.
  - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, yang direncanakan sebesar Rp.7.000.000.000,.
  - c. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, yang direncanakan sebesar Rp.5.000.000.000,.
  - d. Retribusi Pelayanan Pasar, yang direncanakan sebesar Rp.200.000.000,.
- (3) Anggaran Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 23.200.000.000,- (Dua Puluh Tiga Milyar Dua Ratus Juta Rupiah), terdiri atas:
  - a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, yang direncanakan sebesar Rp. 7.000.000.000,.



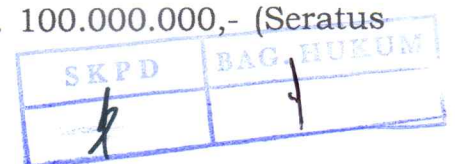
- b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan, yang direncanakan sebesar Rp.13.500.000.000,-
  - c. Retribusi Tempat Pelelangan, yang direncanakan sebesar Rp. 250.000.000,.
  - d. Retribusi Tempat Khusus Parkir, yang direncanakan sebesar Rp. 1.000.000.000,.
  - e. Retribusi Rumah Potong Hewan, yang direncanakan sebesar Rp. 200.000.000,.
  - f. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan, yang direncanakan sebesar Rp. 350.000.000,.
  - g. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, yang direncanakan sebesar Rp. 750.000.000,.
  - h. Retribusi Penyeberangan di Air, yang direncanakan sebesar Rp. 100.000.000,
- (4) Anggaran Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 2.018.000.000,- (Dua Milyar Delapan Belas Juta Rupiah), terdiri dari:
- a. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung, yang direncanakan sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah).
  - b. Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing, yang direncanakan sebesar Rp.18.000.000,- (Delapan Juta Rupiah).

#### Pasal 7

Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp.3.500.000.000,- (Tiga Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) yaitu Bagian Laba Yang Dibagikan Kepada Pemerintah Daerah (Dividen) Atas Penyertaan Modal Pada Badan Usaha Milik Daerah.

#### Pasal 8

- (1) Anggaran Lain-lain PAD Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp.13.450.000.000,- (Tiga Belas Milyar Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), yang terdiri atas:
- a. Hasil Penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan;
  - b. Hasil Pemanfaatan BMD Yang Tidak Dipisahkan;
  - c. Jasa Giro;
  - d. Pendapatan Bunga;
  - e. Pendapatan Denda Pajak Daerah;
  - f. Pendapatan Dari Pengembalian.
- (2) Hasil Penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah).



- (3) Hasil Pemanfaatan BMD Yang Tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah).
- (4) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah).
- (5) Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah).
- (6) Pendapatan Denda Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp. 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah).
- (7) Pendapatan dari Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 2.500.000.000,- (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).

#### Pasal 9

- (1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, direncanakan sebesar Rp. 957.595.878.000,- (Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah), terdiri dari:
  - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
  - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 878.595.878.000,- (Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah), merupakan Dana Perimbangan yang terdiri atas:
  - a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH), direncanakan sebesar Rp. 103.496.563.000,- (Seratus Tiga Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Lima Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah).
  - b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU), direncanakan sebesar Rp. 657.651.781.000 (Enam Ratus Lima Puluh Tujuh Milyar Enam Ratus Lima Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah).
  - c. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik , direncanakan sebesar Rp. 6.872.517.000,- (Enam Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Lima Ratus Tujuh Belas Ribu Rupiah).
  - d. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik , direncanakan sebesar Rp. 110.575.017.000,- (Seratus Sepuluh Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Tujuh Belas Ribu Rupiah).

SKPD	DAG. KURUM
	



- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 79.000.000.000,- (Tujuh Puluh Sembilan Milyar Rupiah), merupakan Pendapatan Bagi Hasil Pajak yang terdiri atas:
- a. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, yang direncanakan sebesar Rp. 44.950.000.000,- (Empat Puluh Empat Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
  - b. Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, yang direncanakan sebesar Rp. 6.625.898.750,- (Enam Milyar Enam Ratus Dua Puluh Lima Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah).
  - c. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, yang direncanakan sebesar Rp. 6.695.598.250,- (Enam Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah).
  - d. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan, yang direncanakan sebesar Rp. 793.644.500,- (Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Enam Ratus Empat Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah).
  - e. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok, yang direncanakan sebesar Rp. 19.934.858.500,- (Sembilan Belas Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Juta Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah).

#### Pasal 10

- (1) Anggaran Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, direncanakan sebesar Rp. 6.069.061.130,- (Enam Milyar Enam Puluh Sembilan Juta Enam puluh Satu Ribu Seratus Tiga Puluh Rupiah), yang terdiri atas:
- a. Pendapatan Hibah;
  - b. Dana Darurat; dan
  - c. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang undangan.
- (2) Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0 (Nol Rupiah).
- (3) Dana Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.0 (Nol Rupiah).
- (4) Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp. 6.069.061.130,- (Enam Milyar Enam Puluh Sembilan Juta Enam Puluh Satu Ribu Seratus Tiga Puluh Rupiah) merupakan Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).

SKPD	BAG. HUKUM
	

Pasal 11

Anggaran Belanja Daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp. 1.101.982.939.130,- (Satu Triliun Seratus Satu Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Seratus Tiga Puluh Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer;

Pasal 12

(1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, direncanakan sebesar Rp. 979.122.197.731,- (Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Milyar Seratus Dua Puluh Dua Juta Seratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Pegawai;
- b. Belanja Barang dan Jasa;
- c. Belanja Bunga;
- d. Belanja Subsidi;
- e. Belanja Hibah; dan
- f. Belanja Bantuan Sosial.

(2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a direncanakan sebesar Rp. 569.065.923.338,- (Lima Ratus Enam Puluh Sembilan Milyar Enam Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN, sebesar Rp. 358.532.104.756,-
- b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN, sebesar Rp. 188.424.195.371,-
- c. Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN, sebesar Rp. 60.945.317.271,-.
- d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD, sebesar Rp. 20.488.396.723,-.
- e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH, sebesar Rp. 182.666.488,-
- f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH, sebesar Rp. 801.600.000,-.
- g. Belanja Pegawai BLUD, sebesar Rp. 636.960.000,-.

(3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 400.017.074.393,- (Empat Ratus Milyar Tujuh Belas Juta Tujuh Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah), yang terdiri dari:

- a. Belanja Barang, sebesar Rp. 98.947.369.429,46,.
- b. Belanja Jasa, sebesar Rp. 189.004.780.932,84,-.
- c. Belanja Pemeliharaan, sebesar Rp. 3.984.036.480,70,-
- d. Belanja Perjalanan Dinas, sebesar Rp. 66.213.945.310,-.



- e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat, sebesar Rp. 4.094.425.000,-.
  - f. Belanja Barang dan Jasa BOS sebesar Rp. 36.129.590.000,-.
- (4) Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 0,.
- (5) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 0,.
- (6) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 8.555.200.000,-
- a. Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia, sebesar Rp. 4.780.200.000,-.
  - b. Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, sebesar Rp. 3.775.000.000,-.
- (7) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 1.484.000.000,- yaitu diperuntukkan bagi Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat.

#### Pasal 13

Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b direncanakan sebesar Rp. 102.860.741.399,- ( Seratus Dua Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal Tanah direncanakan sebesar Rp 5.916.042.500,-
- b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin direncanakan sebesar Rp. 17.062.352.033,-.
- c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan direncanakan sebesar Rp. 27.212.805.180,-.
- d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi direncanakan sebesar Rp. 51.562.618.686,-
- e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya, direncanakan sebesar Rp. 206.923.000,-.
- f. Belanja Modal Aset Lainnya, direncanakan sebesar Rp. 900.000.000,-.

#### Pasal 14

Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c direncanakan sebesar Rp. 20.000.000.000,- ( Dua Puluh Milyar Rupiah).

#### Pasal 15

Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d direncanakan sebesar Rp.0 (Nol Rupiah).

SKPD	BAG. HUKUM
/	/

## Pasal 16

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp.3.000.000.000,- (Tiga Milyar Rupiah), yang terdiri atas:



- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.

## Pasal 17

- (1) Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, direncanakan sebesar Rp.0 (Nol Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
  - b. Pencairan dana cadangan;
  - c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
  - d. Penerimaan pinjaman daerah;
  - e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan
  - f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.0 (Nol Rupiah).
- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.0 (Nol Rupiah).
- (4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada Ayat(1) huruf c, direncanakan sebesar Rp.0 (Nol Rupiah).
- (5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp.0 (Nol Rupiah).
- (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp.0 (Nol Rupiah).
- (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp.0 (Nol Rupiah).

## Pasal 18

- (1) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, huruf b direncanakan sebesar Rp.3.000.000.000,- (Tiga Milyar Rupiah) yang terdiri atas:
  - a. Pembentukan dana cadangan ;
  - b. Penyertaan modal daerah;
  - c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
  - d. Pemberian pinjaman daerah; dan
  - e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.0 (Nol Rupiah).

SKPD	BAG. HUKUM
	

- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.3.000.000.000,- (Tiga Milyar Rupiah)
- (4) Pembayaran Pokok Hutang yang Jatuh Tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp.0 (Nol Rupiah)
- (5) Pemberian Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp.0,- (Nol Rupiah)
- (6) Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp.0,- (Nol Rupiah).

#### Pasal 19

- (1) Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya Surplus/(Defisit) sebesar Rp.3.000.000.000,- (Tiga Milyar Rupiah).
- (2) Pembiayaan Netto yang merupakan selisih Penerimaan Pembiayaan terhadap Pengeluaran Pembiayaan direncanakan sebesar Rp.3.000.000.000,- (Tiga Milyar Rupiah).

#### Pasal 20

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Wali kota ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut Kelompok, Jenis, Objek dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat Umum dan bersifat Khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Belanja Bagi Hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

SKPD	BAG. HUKUM
	

8. Lampiran VIII Rincian DBH- SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi). Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

Pasal 21

Lampiran sebagaimana tersebut dalam pasal 20 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Walikota ini.

Pasal 22

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 23

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate  
pada tanggal 31 Desember 2024

WALI KOTA TERNATE,

M. TAUNID SOLEMAN



Diundangkan di Ternate  
pada tanggal 31 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,

RIZAL MARSAOLY

BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2024 NOMOR 603

SKPD	BAG HUKUM



**KOTA TERNATE**  
**RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025**

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>141.318.000.000,00</b>
4.1.01	Pajak Daerah	86.650.000.000,00
4.1.01.07	Pajak Restoran	16.750.000.000,00
4.1.01.07.02	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	16.750.000.000,00
4.1.01.07.02.0001	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	16.750.000.000,00
4.1.01.09	Pajak Reklame	2.900.000.000,00
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	2.900.000.000,00
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	2.900.000.000,00
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	28.000.000.000,00
4.1.01.10.01	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	28.000.000.000,00
4.1.01.10.01.0001	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	28.000.000.000,00
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	750.000.000,00
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	750.000.000,00
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	750.000.000,00
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.500.000.000,00
4.1.01.14.39	Pajak MBLB Ikutan Dalam Suatu Pertambangan Mineral	1.500.000.000,00
4.1.01.14.39.0001	Pajak MBLB Ikutan Dalam Suatu Pertambangan Mineral	1.500.000.000,00
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	8.000.000.000,00
4.1.01.15.01	PBBP2	8.000.000.000,00
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	8.000.000.000,00
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	6.000.000.000,00
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	6.000.000.000,00
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	6.000.000.000,00
4.1.01.19	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	9.750.000.000,00
4.1.01.19.03	PBJT-Jasa Perhotelan	6.250.000.000,00
4.1.01.19.03.0001	PBJT-Hotel	6.250.000.000,00
4.1.01.19.04	PBJT-Jasa Parkir	500.000.000,00
4.1.01.19.04.0001	PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir	500.000.000,00
4.1.01.19.05	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	3.000.000.000,00
4.1.01.19.05.0002	PBJT-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana	3.000.000.000,00
4.1.01.20	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	6.500.000.000,00
4.1.01.20.01	Opsen PKB	6.500.000.000,00
4.1.01.20.01.0001	Opsen PKB	6.500.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.01.21	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	6.500.000.000,00
4.1.01.21.01	Opsen BBNKB	6.500.000.000,00
4.1.01.21.01.0001	Opsen BBNKB	6.500.000.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	37.718.000.000,00
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	12.500.000.000,00
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	300.000.000,00
4.1.02.01.01.0001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	300.000.000,00
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	7.000.000.000,00
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	7.000.000.000,00
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	5.000.000.000,00
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	5.000.000.000,00
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	200.000.000,00
4.1.02.01.05.0003	Retribusi Kios	200.000.000,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	23.200.000.000,00
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	7.000.000.000,00
4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	7.000.000.000,00
4.1.02.02.03	Retribusi Tempat Pelelangan	250.000.000,00
4.1.02.02.03.0002	Retribusi Penyediaan Fasilitas Lainnya di Tempat Pelelangan	250.000.000,00
4.1.02.02.07	Retribusi Rumah Potong Hewan	200.000.000,00
4.1.02.02.07.0001	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	200.000.000,00
4.1.02.02.12	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	13.500.000.000,00
4.1.02.02.12.0001	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	13.500.000.000,00
4.1.02.02.14	Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	1.000.000.000,00
4.1.02.02.14.0001	Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	1.000.000.000,00
4.1.02.02.16	Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan	350.000.000,00
4.1.02.02.16.0001	Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan	350.000.000,00
4.1.02.02.17	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	750.000.000,00
4.1.02.02.17.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	750.000.000,00
4.1.02.02.18	Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang dengan Menggunakan Kendaraan di Air	100.000.000,00
4.1.02.02.18.0001	Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang dengan Menggunakan Kendaraan di Air	100.000.000,00
4.1.02.02.19	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	50.000.000,00
4.1.02.02.19.0001	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	50.000.000,00
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	2.018.000.000,00
4.1.02.03.07	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	2.000.000.000,00
4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	2.000.000.000,00



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.02.03.08	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	18.000.000,00
4.1.02.03.08.0001	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	18.000.000,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.500.000.000,00
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	3.500.000.000,00
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	3.500.000.000,00
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	3.500.000.000,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	13.450.000.000,00
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	100.000.000,00
4.1.04.01.08	Hasil Penjualan Aset Lain-Lain	100.000.000,00
4.1.04.01.08.0002	Hasil Penjualan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	100.000.000,00
4.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	10.000.000.000,00
4.1.04.03.02	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	10.000.000.000,00
4.1.04.03.02.0001	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	10.000.000.000,00
4.1.04.05	Jasa Giro	200.000.000,00
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	200.000.000,00
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	200.000.000,00
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	500.000.000,00
4.1.04.07.01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	500.000.000,00
4.1.04.07.01.0001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	500.000.000,00
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	150.000.000,00
4.1.04.12.07	Pendapatan Denda Pajak Restoran	150.000.000,00
4.1.04.12.07.0002	Pendapatan Denda Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	150.000.000,00
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	2.500.000.000,00
4.1.04.15.04	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	2.500.000.000,00
4.1.04.15.04.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Biasa	2.500.000.000,00
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>957.595.878.000,00</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	878.595.878.000,00
4.2.01.07	Dana Bagi Hasil (DBH)	103.496.563.000,00
4.2.01.07.01	DBH Pajak	27.864.564.000,00
4.2.01.07.01.0001	DBH PBB	6.852.625.000,00
4.2.01.07.01.0002	DBH PPh Pasal 21	21.011.939.000,00
4.2.01.07.02	DBH Sumber Daya Alam (SDA)	75.631.999.000,00
4.2.01.07.02.0003	DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi	23.318.000,00
4.2.01.07.02.0005	DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty	75.597.650.000,00
4.2.01.07.02.0006	DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	11.031.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.2.01.07.02.0009	DBH SDA Perikanan	0,00
4.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	657.651.781.000,00
4.2.01.08.01	DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya	558.017.106.000,00
4.2.01.08.01.0001	DAU	558.017.106.000,00
4.2.01.08.02	DAU yang Ditentukan Penggunaannya	99.634.675.000,00
4.2.01.08.02.0001	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	15.600.000.000,00
4.2.01.08.02.0003	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	8.130.982.000,00
4.2.01.08.02.0004	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	58.717.924.000,00
4.2.01.08.02.0005	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	12.933.657.000,00
4.2.01.08.02.0006	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	4.252.112.000,00
4.2.01.09	Dana Alokasi Khusus (DAK)	117.447.534.000,00
4.2.01.09.01	DAK Fisik	6.872.517.000,00
4.2.01.09.01.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	1.092.405.000,00
4.2.01.09.01.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	255.803.000,00
4.2.01.09.01.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	240.996.000,00
4.2.01.09.01.0013	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	2.358.782.000,00
4.2.01.09.01.0015	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian	1.498.000.000,00
4.2.01.09.01.0075	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem Kesehatan	1.426.531.000,00
4.2.01.09.02	DAK Non Fisik	110.575.017.000,00
4.2.01.09.02.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	32.215.800.000,00
4.2.01.09.02.0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	1.394.750.000,00
4.2.01.09.02.0009	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum	809.659.000,00
4.2.01.09.02.0021	DAK Non Fisik-BOKB-KB	4.178.890.000,00
4.2.01.09.02.0022	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	505.690.000,00
4.2.01.09.02.0028	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler	1.818.000.000,00
4.2.01.09.02.0029	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja	90.000.000,00
4.2.01.09.02.0030	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	521.040.000,00
4.2.01.09.02.0031	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja	90.000.000,00
4.2.01.09.02.0033	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	4.172.055.000,00
4.2.01.09.02.0034	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan	595.288.000,00
4.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	10.463.087.000,00
4.2.01.09.02.0036	DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tunjangan Profesi Guru	52.881.008.000,00
4.2.01.09.02.0037	DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tambahan Penghasilan Guru	839.750.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	79.000.000.000,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	79.000.000.000,00
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	79.000.000.000,00
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	44.950.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	6.625.898.750,00
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	6.695.598.250,00
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	793.644.500,00
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	19.934.858.500,00
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>6.069.061.130,00</b>
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	6.069.061.130,00
4.3.03.02	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	6.069.061.130,00
4.3.03.02.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	6.069.061.130,00
4.3.03.02.01.0001	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	6.069.061.130,00
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>1.104.982.939.130,00</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>979.122.197.731,00</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	569.065.923.338,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	358.532.104.756,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	274.093.555.177,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	246.471.572.633,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	27.621.982.544,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	22.862.777.018,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	20.565.277.405,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	2.297.499.613,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	9.085.365.000,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	9.085.365.000,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	18.383.045.120,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	15.824.691.500,00
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	2.558.353.620,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	4.072.795.400,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	3.804.295.000,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	268.500.400,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	14.000.696.802,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	12.273.430.500,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	1.727.266.302,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	498.094.000,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	498.094.000,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	4.095.957,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	3.556.000,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	539.957,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	12.865.686.425,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	11.475.834.200,00
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	1.389.852.225,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	666.567.845,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	595.430.000,00
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	71.137.845,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	1.999.426.012,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1.786.117.500,00
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	213.308.512,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	188.424.195.371,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	126.820.110.600,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	112.517.937.600,00
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	14.302.173.000,00
5.1.01.02.02	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN	658.767.500,00
5.1.01.02.02.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS	658.767.500,00
5.1.01.02.06	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	60.945.317.271,00
5.1.01.02.06.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Hotel	5.027.422.421,00
5.1.01.02.06.0064	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	52.881.008.000,00
5.1.01.02.06.0066	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	839.750.000,00
5.1.01.02.06.0067	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	2.197.136.850,00
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	20.488.396.723,00
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	702.597.750,00
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	702.597.750,00
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	94.050.600,00
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	94.050.600,00
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	121.665.600,00
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	121.665.600,00
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	57.582.000,00
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	57.582.000,00
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	974.095.000,00
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	974.095.000,00
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	99.388.800,00
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	99.388.800,00
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	15.894.900,00
5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	15.894.900,00
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	3.780.000.000,00
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	3.780.000.000,00
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	945.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	945.000.000,00
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	36.112.700,00
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	36.112.700,00
5.1.01.04.11	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	150.900,00
5.1.01.04.11.0001	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	150.900,00
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	7.829.858.473,00
5.1.01.04.12.0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	327.283.848,00
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	2.189.266,00
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	6.385.359,00
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	7.494.000.000,00
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	5.832.000.000,00
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	5.832.000.000,00
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	182.666.488,00
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	56.672.500,00
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	56.672.500,00
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.934.200,00
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.934.200,00
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	102.010.500,00
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	102.010.500,00
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	8.419.000,00
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	8.419.000,00
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	462.100,00
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	462.100,00
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.200,00
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.200,00
5.1.01.05.07	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	6.664.688,00
5.1.01.05.07.0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	6.664.688,00
5.1.01.05.08	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	125.600,00
5.1.01.05.08.0001	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	125.600,00
5.1.01.05.09	Belanja luran Jaminan Kematian KDH/WKDH	376.700,00
5.1.01.05.09.0001	Belanja luran Jaminan Kematian KDH/WKDH	376.700,00
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	801.600.000,00
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	201.600.000,00
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	201.600.000,00
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	600.000.000,00
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	600.000.000,00
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	636.960.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	636.960.000,00
5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD	636.960.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	400.017.074.393,00
5.1.02.01	Belanja Barang	98.947.369.429,46
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	93.189.752.332,62
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	3.599.959.940,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	10.072.615.605,46
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	1.104.880.890,00
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	267.705.000,00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	1.811.913.100,00
5.1.02.01.01.0014	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	400.160.860,00
5.1.02.01.01.0019	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	1.500.000,00
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	73.909.050,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	6.480.929.509,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.651.289.675,61
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4.916.370.660,07
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	369.811.295,18
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	902.100.333,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.473.053.765,50
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	161.084.411,25
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	106.268.477,50
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	16.125.500,00
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	696.902.500,00
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	2.188.536.775,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	22.440.693.576,00
5.1.02.01.01.0040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	5.938.973.249,00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	117.216.000,00
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	30.000.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.953.432.550,05
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	5.957.304.970,00
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	129.081.000,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	4.846.717.490,00
5.1.02.01.01.0059	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	200.000.000,00
5.1.02.01.01.0060	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	617.181.000,00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	100.732.500,00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	251.559.000,00
5.1.02.01.01.0067	Belanja Pakaian Penyelamatan	52.030.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.01.01.0070	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	196.920.500,00
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	456.593.500,00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	45.375.000,00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	115.950.000,00
5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka	444.874.650,00
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	486.200,00
5.1.02.01.02.0012	Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	486.200,00
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	5.757.130.896,84
5.1.02.01.04.0081	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya	16.669.313,00
5.1.02.01.04.0091	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Timbangan/Biara	420.800,00
5.1.02.01.04.0103	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	859.953.875,00
5.1.02.01.04.0111	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat-Alat Peternakan	62.277.436,00
5.1.02.01.04.0120	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	250.734.167,00
5.1.02.01.04.0124	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	3.099.250,00
5.1.02.01.04.0132	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	22.431.375,00
5.1.02.01.04.0237	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya	21.600.000,00
5.1.02.01.04.0301	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Lainnya	2.651.330,00
5.1.02.01.04.0411	Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	20.999.247,50
5.1.02.01.04.0446	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Baju Pengaman	21.153.000,00
5.1.02.01.04.0450	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Sepatu Lapangan	33.660.000,00
5.1.02.01.04.0451	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Alat Pelindung Lainnya	18.254.000,00
5.1.02.01.04.0494	Belanja Peralatan dan Mesin-Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	28.166.200,00
5.1.02.01.04.0509	Belanja Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Lainnya	292.891.024,00
5.1.02.01.04.0510	Belanja Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	3.602.979.771,51
5.1.02.01.04.0710	Belanja Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Umum	499.190.107,83
5.1.02.02	Belanja Jasa	189.004.780.932,84
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	161.391.060.246,84
5.1.02.02.01.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	200.400.000,00
5.1.02.02.01.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	100.800.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	4.129.034.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	5.701.050.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	1.371.600.000,00
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	61.000.000,00
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	642.100.000,00
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	6.075.866.200,00
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	565.800.000,00
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	1.943.500.000,00
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	6.849.000.400,00
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	1.314.700.000,00
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	8.161.500.000,00
5.1.02.02.01.0018	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1.503.500.000,00
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	540.100.000,00
5.1.02.02.01.0022	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	165.600.000,00
5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	189.000.000,00
5.1.02.02.01.0024	Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	44.800.000,00
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	1.750.500.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	55.687.534.000,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	1.608.600.000,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	2.718.699.602,93
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	19.810.833.948,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	1.255.300.000,00
5.1.02.02.01.0032	Belanja Jasa Tenaga Caraka	11.000.000,00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	1.229.200.000,00
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	117.219.200,00
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	302.000.000,00
5.1.02.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias	47.875.000,00
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	60.000.000,00
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	100.988.604,40
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	172.000.000,00
5.1.02.02.01.0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	7.100.000,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	3.882.890.000,00
5.1.02.02.01.0057	Belanja Jasa Operator Kapal	12.000.000,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	1.045.649.667,54
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	14.521.215.794,48
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	1.076.761.087,50
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	5.614.808.441,99
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	104.711.500,00



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	728.720.000,00
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	2.796.033.000,00
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	100.000.000,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	6.156.469.800,00
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	685.600.000,00
5.1.02.02.01.0082	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	228.000.000,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	17.893.713.301,00
5.1.02.02.02.0004	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	14.554.573.101,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	3.278.617.000,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	60.523.200,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	3.341.199.385,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	513.992.520,00
5.1.02.02.04.0049	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	382.200.000,00
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	1.628.887.565,00
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	601.650.000,00
5.1.02.02.04.0206	Belanja Sewa Alat Kedokteran Keluarga Berencana	130.000.000,00
5.1.02.02.04.0237	Belanja Sewa Alat Kesehatan Umum Lainnya	469.300,00
5.1.02.02.04.0255	Belanja Sewa Alat Laboratorium Makanan	84.000.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	2.672.308.000,00
5.1.02.02.05.0002	Belanja Sewa Bangunan Gudang	89.800.000,00
5.1.02.02.05.0008	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Ibadah	90.000.000,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	2.191.108.000,00
5.1.02.02.05.0037	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	135.000.000,00
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	166.400.000,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	1.536.500.000,00
5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	1.036.500.000,00
5.1.02.02.08.0017	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Pengembangan Pemanfaatan Ruang	500.000.000,00
5.1.02.02.11	Belanja Beasiswa Pendidikan ASN	420.000.000,00
5.1.02.02.11.0002	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	420.000.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	1.750.000.000,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	275.000.000,00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	740.000.000,00
5.1.02.02.12.0004	Belanja Diklat Kepemimpinan	735.000.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	3.984.036.480,70
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.408.036.480,70
5.1.02.03.02.0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	20.960.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.008.612.368,70
5.1.02.03.02.0049	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	60.720.000,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	403.890.000,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	468.262.400,00
5.1.02.03.02.0133	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	800.000.000,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	307.853.000,00
5.1.02.03.02.0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	332.628.712,00
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	5.110.000,00
5.1.02.03.06	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	576.000.000,00
5.1.02.03.06.0005	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software	576.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	66.213.945.310,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	66.213.945.310,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	36.382.833.600,00
5.1.02.04.01.0002	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	5.867.834.600,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	21.836.870.110,00
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1.418.115.000,00
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	708.292.000,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	4.094.425.000,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	691.200.000,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	691.200.000,00
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3.403.225.000,00
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	3.403.225.000,00
5.1.02.89	Belanja Barang dan Jasa BOSP	36.129.590.000,00
5.1.02.89.01	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS	33.610.550.000,00
5.1.02.89.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Reguler	32.215.800.000,00
5.1.02.89.01.0002	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Kinerja	1.394.750.000,00
5.1.02.89.02	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD	1.908.000.000,00
5.1.02.89.02.0001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD Reguler	1.818.000.000,00
5.1.02.89.02.0002	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD Kinerja	90.000.000,00
5.1.02.89.03	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan	611.040.000,00
5.1.02.89.03.0001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	521.040.000,00
5.1.02.89.03.0002	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja	90.000.000,00
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	1.642.927.240,00
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	1.642.927.240,00
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	1.642.927.240,00
5.1.05	Belanja Hibah	8.555.200.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	8.555.200.000,00
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	3.430.200.000,00
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	3.430.200.000,00
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	1.350.000.000,00
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	1.350.000.000,00
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	2.450.000.000,00
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	2.450.000.000,00
5.1.05.05.06	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	1.325.000.000,00
5.1.05.05.06.0001	Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	1.325.000.000,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	1.484.000.000,00
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	100.000.000,00
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	100.000.000,00
5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	100.000.000,00
5.1.06.02	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	54.000.000,00
5.1.06.02.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga	54.000.000,00
5.1.06.02.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	54.000.000,00
5.1.06.03	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	1.330.000.000,00
5.1.06.03.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	1.330.000.000,00
5.1.06.03.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	1.330.000.000,00
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>102.860.741.399,00</b>
5.2.01	Belanja Modal Tanah	5.916.042.500,00
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	5.916.042.500,00
5.2.01.01.01	Belanja Modal Tanah Persil	5.916.042.500,00
5.2.01.01.01.0007	Belanja Modal Tanah Persil Lainnya	5.916.042.500,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	17.062.352.033,00
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	1.709.183.740,00
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	1.709.183.740,00
5.2.02.01.03.0003	Belanja Modal Compressor	10.000.000,00
5.2.02.01.03.0004	Belanja Modal Electric Generating Set	1.500.000.000,00
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	137.183.740,00
5.2.02.01.03.0016	Belanja Modal Alat Bantu Lainnya	62.000.000,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	6.358.332.000,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	6.358.332.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	2.085.340.000,00
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	247.992.000,00
5.2.02.02.01.0005	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	525.000.000,00
5.2.02.02.01.0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	3.500.000.000,00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	4.090.630,00
5.2.02.03.01	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	4.090.630,00
5.2.02.03.01.0010	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Lainnya	4.090.630,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	2.657.692.214,13
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	8.000.000,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	8.000.000,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	2.611.231.935,13
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	1.733.430.694,13
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	30.694.070,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	717.921.521,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	129.185.650,00
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	38.460.279,00
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	38.460.279,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	1.406.837.632,49
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	1.406.837.632,49
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	418.505.888,99
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	10.645.580,00
5.2.02.06.01.0004	Belanja Modal Peralatan Cetak	754.268.140,50
5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	223.418.023,00
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	57.972.694,00
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	57.972.694,00
5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	57.972.694,00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	151.991.738,00
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	57.000.000,00
5.2.02.08.01.0058	Belanja Modal Alat Laboratorium Pendidikan	57.000.000,00
5.2.02.08.03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	94.991.738,00
5.2.02.08.03.0015	Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK	94.991.738,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	4.042.792.184,38
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	3.935.792.184,38
5.2.02.10.01.0001	Belanja Modal Komputer Jaringan	1.224.282.672,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	2.711.509.512,38
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	107.000.000,00
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	107.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	598.459.200,00
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	598.459.200,00
5.2.02.18.01.0003	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	598.459.200,00
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	75.000.000,00
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	75.000.000,00
5.2.02.99.99.9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	75.000.000,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	27.212.805.180,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	25.622.805.180,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	25.622.805.180,00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	16.019.448.570,00
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	1.355.204.450,00
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	7.931.812.160,00
5.2.03.01.01.0030	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	8.170.000,00
5.2.03.01.01.0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	300.000.000,00
5.2.03.01.01.0037	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	8.170.000,00
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	1.590.000.000,00
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	1.590.000.000,00
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	1.590.000.000,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	51.562.618.686,00
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	31.258.064.201,00
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	30.196.709.000,00
5.2.04.01.01.0004	Belanja Modal Jalan Kota	7.355.000.000,00
5.2.04.01.01.0009	Belanja Modal Jalan Khusus	15.972.300.000,00
5.2.04.01.01.0010	Belanja Modal Jalan Lainnya	6.869.409.000,00
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	1.061.355.201,00
5.2.04.01.02.0004	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kota	300.000.000,00
5.2.04.01.02.0010	Belanja Modal Jembatan Penyeberangan	761.355.201,00
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	17.010.000.000,00
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	9.510.000.000,00
5.2.04.02.01.0008	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya	9.510.000.000,00
5.2.04.02.04	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	6.600.000.000,00
5.2.04.02.04.0007	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya	6.600.000.000,00
5.2.04.02.06	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	200.000.000,00
5.2.04.02.06.0006	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	200.000.000,00
5.2.04.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	700.000.000,00
5.2.04.02.07.0006	Belanja Modal Bangunan Air Kotor Lainnya	700.000.000,00
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	2.903.454.485,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.04.03.01	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	2.903.454.485,00
5.2.04.03.01.0005	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	2.903.454.485,00
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	391.100.000,00
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	391.100.000,00
5.2.04.04.02.0003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	391.100.000,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	206.923.000,00
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	206.923.000,00
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	206.923.000,00
5.2.05.01.01.0012	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya	206.923.000,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	900.000.000,00
5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	900.000.000,00
5.2.06.01.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	900.000.000,00
5.2.06.01.01.0005	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	850.000.000,00
5.2.06.01.01.0009	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Lainnya	50.000.000,00
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>20.000.000.000,00</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	20.000.000.000,00
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	20.000.000.000,00
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	20.000.000.000,00
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	20.000.000.000,00
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>1.101.982.939.130,00</b>
	<b>Total Surplus/(Defisit)</b>	<b>3.000.000.000,00</b>
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	
<b>6.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>3.000.000.000,00</b>
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	3.000.000.000,00
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	3.000.000.000,00
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	3.000.000.000,00
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	3.000.000.000,00
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>3.000.000.000,00</b>
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>-3.000.000.000,00</b>
<b>6.3</b>	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00

Kota Ternate, 31 Desember 2024

Walikota  
  
 Dr. M. Fauha Soleman, M.Si